

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)**

Signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar. Sehingga akan memberi pengaruh terhadap keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “wait and see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangannya yang ada baru kemudian mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari timbulnya resiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya (Fahmi, 2014)

Teori Signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal disini yang dimaksud adalah underwriter, investor, kreditor atau pengguna informasi lainnya. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme signalling yang berbeda-beda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan (Cahyani 2009). Kemungkinan lain, pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya dan begitu sebaliknya.



Perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Teori Signal melandasi pengungkapan sukarela. Teori Signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Ratna Sari 2019).

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik menunjukkan semakin besar perusahaan makin banyak informasi sukarela yang disampaikan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan signal positif bagi perusahaan. Pengungkapan intellectual capital merupakan salah satu pengungkapan sukarela yang bisa menjadi sinyal positif bagi perusahaan kepada pengguna informasi keuangan.

## **2.2 Kebijakan Utang**

Kebijakan utang adalah kebijakan yang di ambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai ektivitas operasional perusahaan. Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan Bambang Riyanto (2011). Dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan.

Selain itu kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Keputusan pembiayaan atau pendanaan perusahaan akan dapat

memengaruhi struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan (Kartika 2009). Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir, 2008).

Hutang juga merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan yang harus segera dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo (Bambang Riyanto, 2008 : 227). Ada tiga golongan dalam hutang, antara lain :

1. Hutang jangka pendek (Short –term Debt) Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis- jenis daripada modal asing jangka pendek yang terutama adalah:
  - a. Rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan dengan batas plafond tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya, dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.
  - b. Kredit dari Penjual, merupakan kredit perniagaan (trade-credit) dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjual baru menerima pembayaran harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan.

- c. Kredit dari Pembeli, merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari bahan mentahnya atau barang- barang lainnya. Disini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya.
  - d. Kredit Wesel, kredit ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan “surat pengakuan hutang” yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu (surat Promes / Notes Payables), dan setelah ditanda tangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan kepada Bank.
2. Hutang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) Adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak. Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah, antara lain:
- a. Term Loan yaitu kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu, Term Loan ini biasanya diberikan oleh Bank dagang, Perusahaan asuransi, suppliers atau Manufactures.
  - b. Leasing, adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan “service” dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan “service” dan hak milik atas aktiva tersebut dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik.

3. Hutang jangka panjang (Long-Term Debt) Merupakan hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Adapun jenis utama dari hutang jangka panjang antara lain:

a. Pinjaman Obligasi (Bonds-payables), adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

- Jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya di dalam perusahaan.
- Jumlah angsuran harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktivatetap yang akan dibelanjai dengan kredit obligasi tersebut. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari :

1) penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut

2) keuntungan.

*Pengukuran kebijakan utang menggunakan DER (debt equity ratio) adalah adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, berikut rumus perhitungan DER:*

DER: Total liabilitas/total ekuitas

*Keterangan: Total liabilitas= total utang*

*Total euqitas= total modal*

### **2.3 Definisi Kebijakan Hutang**

Berikut beberapa definisi kebijakan hutang, yaitu:

- a. Kebijakan hutang menurut Riyanto (2011:98) adalah sebagai berikut:  
“Kebijakan hutang adalah keputusan yang sangat penting dalam perusahaan dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.”
- b. Menurut Subramanyan dan Wild yang dialih bahasakan oleh Dewi Yanti (2012:82), menyatakan kebijakan hutang adalah sebagai berikut: “Bagi pemegang saham dengan adanya kebijakan hutang berarti mendapatkan tambahan dana yang berasal dari pinjaman mampu member pengaruh positif bagi peningkatan kinerja para manajemen perusahaan.”
- c. Menurut Hartono (2011:137) menyatakan kebijakan hutang adalah sebagai berikut: “Kebijakan hutang adalah keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terefleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.”
- d. Menurut Herawati (2013) kebijakan hutang adalah: “Kebijakan hutang adalah kebijakan yang menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang.”

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kebijakan hutang adalah salah satu aktivitas pendanaan bagi perusahaan, selain modal sendiri, yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu seperti membiayai aktivitas operasional, meningkatkan kinerja manajemen perusahaan, dan tujuan perusahaan lainnya serta menentukan kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai hutang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur modal, (Masril, 2021) namun sebaliknya apabila perusahaan menggunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan. Menurut Mamduh (2004) terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang, antara lain:

- a. NDT (Non-Debt Tax Shield) Manfaat dari penggunaan hutang adalah bunga hutang yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan. Namun untuk mengurangi pajak, perusahaan dapat menggunakan cara lain seperti depresiasi dan dana pensiun. Dengan demikian, perusahaan dengan NDT tinggi tidak perlu menggunakan hutang yang tinggi.
- b. Struktur Aktiva Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat menentukan besarnya penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar karena aktiva tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman.
- c. Profitabilitas Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.
- d. Risiko Bisnis Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan menggunakan hutang yang lebih kecil untuk menghindari risiko



kebangkrutan.

- e. Ukuran Perusahaan Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga menurunkan risiko kebangkrutan. Disamping itu,
- f. perusahaan yang besar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan eksternal.
- g. Kondisi Internal Perusahaan Kondisi internal perusahaan menentukan kebijakan penggunaan hutang dalam suatu perusahaan.

Metode Pengukuran Kebijakan Hutang Menurut Agus Sartono (2010:121) dalam Sudjaja (2017) ada beberapa rasio hutang yang digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Debt to Total Asset (DTA) Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya hutang yang akan digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitya yang ditunjukkan dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva.
2. Debt Equity Ratio (DER) Debt to equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancardengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal atau ekuitas yang ada.
3. Time Interest Earned Mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjangmenghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidak mampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar.

4. Fixed Charge Coverage Fixed charge Coverage merupakan rasio yang menyerupai Time Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.
5. Debt to Assets Ratio (DAR) Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang suatu perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dengan cara membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila diperoleh rasio tinggi berarti pendanaan dengan utang semakin banyak dan semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena perusahaan dinilai tidak mampu menutupi utang- utangnya dengan aktiva yang dimiliki perusahaan.

Kebijakan hutang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan yang akan mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari hutang (Brigham dan Houston 2011). Hal ini berkaitan erat dengan struktur modal yang dipilih perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Pemilik perusahaan lebih menyukai perusahaan menggunakan hutang pada tingkat tertentu agar harapan pemilik perusahaan dapat tercapai. Disamping itu perilaku manajer dan komisaris perusahaan juga dapat dikendalikan. Dalam (Hasni, 2013) Kebijakan hutang sering diukur dengan debt to equity ratio (DER) yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Semakin rendah DER berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki dan kemampuan untuk membayar hutang akan semakin tinggi pula. Dalam (Pakpahan, 2012) .

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang:

1. Menurut Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa Teori Keagenan (agency theory), Hubungan untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Pemegang saham lebih menyukai tindakan perusahaan yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka akan memperoleh dividen atas saham yang mereka miliki juga akan meningkat. Namun pemegang hutang perusahaan tidak memperdulikan berapa besar tingkat keuntungan perusahaan, karena pay-off pemegang hutang perusahaan akan tetap sebesar bunga yang telah ditentukan.
2. Menurut Brealey, et all (2006) teori pecking order berbunyi manajer keuangan tidak memperhitungkan tingkat hutang secara optimal. Kebijakan pendanaan ditentukan oleh tingkat kebutuhan investasi. Jika perusahaan memperoleh kesempatan untuk investasi maka perusahaan akan mencari dana untuk mendanai investasi tersebut. Manajemen perusahaan akan menentukan kebijakan pendanaan itu dengan dana internal, baru kemudian dengan dana eksternal termasuk hutang. Jika dana internal sudah mencukupi maka manajemen tidak perlu menggunakan kebijakan hutang untuk memperoleh dana dari luar. Namun sebaliknya jika investasi yang dilakukan tidak cukup jika hanya menggunakan sumber dana dari internal, maka manajemen perusahaan harus menggunakan kebijakan hutang sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh dana dari luar disamping dengan menerbitkan saham.

Setyawati (2014) tujuan dalam penelitian Setyawati adalah mengetahui bagaimana kebijakan hutang dan biaya modal mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan berusaha mencari kebijakan hutang yang optimal untuk tahun yang akan datang. Modal merupakan hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Sedangkan kebijakan hutang adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang

dengan modal sendiri. Berdasarkan pada konsep cost of capital maka kebijakan hutang yang optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata. Kebijakan hutang yang optimal adalah kebijakan hutang yang meminimumkan biaya penggunaan modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan hutang dan biaya modal mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan berusaha mencari kebijakan hutang yang optimal untuk tahun yang akan datang. Menjelaskan bahwa dengan membuat hutang yang proporsinya semakin besar dalam kebijakan hutang (setyawati 2014) maka hasil atas pengembangan modal sendiri akan sangat meningkat, karena tingkat keuntungan jauh lebih baik daripada bunga yang baru dibayarkan. Kebijakan hutang adalah jumlah hutang jangka panjang dibagi Equity. ( Hasni, 2013)

#### **2.4 Struktur Aset**

Dalam penelitian ini rasio struktur aset diukur dengan melihat perbandingan antara aset tetap dengan total aset. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari kreditur Menurut Mulyawan (2015) struktur aset adalah susunan aktiva kebanyakan industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau hutang hanya sebagai pelengkap. Struktur aset diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Fixed asset ratio (FAR)} = \frac{\text{aset tetap}}{\text{total aset}}$$

#### **2.5 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau dengan ekuitas. Tingkat profitabilitassuatu perusahaan sangat penting bagi investor maupun kreditor.

Mai (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu badan usaha untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam variabel seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Perusahaan menyukai internal financing dan pendanaan dari luar atau eksternal financing sebagai cara manajemen untuk menjaga agar rasio leverage tidak meningkat.

Perusahaan menerbitkan obligasi agar mengamankan terlebih dahulu kemudian bisa saja menerbitkan obligasi konversi jika belum mencapai perusahaan bisa menerbitkan saham. Profitabilitas diukur dengan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aset}}$$

Pada intinya bila perusahaan dari sumber pendanaan internal masih bisa diusahakan, pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur besaran profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Margin Operasi

Margin operasi adalah rasio yang mengukur laba operasi, atau laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dari setiap penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi dengan penjualan.

$$\text{Gross profit margin} = (\text{laba kotor} : \text{total pendapatan}) \times 100\%$$

2. Margin Laba

Margin laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan setelah pengurangan pajak dan biaya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba neto dengan penjualan.

$$\text{Net profit margin} = \text{laba bersih setelah pajak} : \text{penjualan}$$

### 3. Return on Equity (ROE)

ROE adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menghitung seberapa besar keuntungan yang menjadi hak dari pemilik modal sendiri.

Rasio ini dihitung dengan membagi laba neto dengan ekuitas saham biasa.

$$\text{ROE} = \text{laba bersih setelah pajak} : \text{ekuitas pemegang saham}$$

### 4. Return on Investment (ROI)

ROI yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi hasil investasi yang sudah dikeluarkan.

$$\text{ROI} = (\text{laba atas investasi} - \text{investasi awal}) : \text{investasi} \times 100 \%$$

### 5. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2015 dalam Maya & Mia 2022).

$$\text{ROA} = \text{laba bersih} : \text{total aset}$$

Salah satu metode yang diukur dengan menggunakan rumus Return on Asset (ROA) yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset perusahaan. Dalam penelitian Saputri et al. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Berbeda dengan hasil penelitian Paryanti & Mahardhika (2020), Silalahi et al. (2018) dan Leong et al. (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

## 2.6 Penghindaran pajak

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan [perpajakan](#) suatu negara. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017)

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuanketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

Istilah perusahaan awalnya disebut sebagai pedagang. Namun, dengan dihapusnya Pasal 2 sampai Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah pedagang dihapus dan diganti dengan frasa perusahaan. Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Keberadaannya, menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa

dijual ke masyarakat. Merujuk pada berbagai pengertian tersebut, perusahaan adalah badan usaha yang menjadi salah satu subjek pajak di Indonesia sehingga wajib membayar pajak kepada negara dan daerah tempatnya beroperasi. Pajak perusahaan termasuk dalam pajak langsung sehingga harus dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak itu sendiri dan biasanya dibayarkan secara berkala. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan, baik yang berbentuk PT, CV, dan firma juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga merupakan Wajib Pajak yang dan diwajibkan untuk membayar pajak.

Dalam Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada. Dalam penghindaran pajak di proksikan dengan alat ukur CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan rumus perhitungan yaitu:

$$\text{CETR (Cash Effective Tax Rate)} = \frac{\text{beban pajak (penghasilan) kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Atau

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i,t}{\text{pretax income } i,t}$$



## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang sudah di lakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian tersebut antara lain.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juan Pedro Sánchez-Ballesta , José Yagüe b  Q 2 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362">https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362</a>	Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain	Y:kebijakan utang  Proksi: -ETR dan ETR3y (penghindaran pajak) -COD (biaya utang)  X1: penghindaran Pajak X2:biaya utang X3: bank X4:UKM	Hasil penelitian menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh UKM terutama didasarkan pada penerapan pajak khusus tersebut program (yaitu, pengurangan pajak, kredit atau pengecualian) mempunyai <b>dampak positif</b> terhadap biaya pembiayaan utang UKM

2	<p>Endri Endri1, Bob Mustafa2 , Oscar Rynandi3, 2019</p> <p>Q 3</p> <p><a href="https://doi.org/10.32479/ijefi.7618">https://doi.org/10.32479/ijefi.7618</a></p>	<p>Determinants of Debt Policy of Real Estate and Property Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange</p>	<p>Y:kebijakan utang</p> <p>Proksi:</p> <p>-Uji Chow</p> <p>-uji pengalihan</p> <p>-lagrange</p> <p>X1:Pajak X2:Perlindungan pajak X3:Profitabilitas X4:pertumbuhan</p>	<p>1. CTXR (pajak perusahaan) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang (leverage)</p> <p>2. NDTs (perlindungan pajak) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang (leverage)</p> <p>3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang</p> <p>4.pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang (laverage)</p>
---	--	---	---	---

3	<p>Franziska Bremus , Kirsten Schmidt , Lena Tonzer , 2020</p> <p>Q1 <a href="http://www.elsevier.com/locate/jbf">http://www.elsevier.com/locate/jbf</a></p>	<p>Interactions between bank levies and corporate taxes: How is bank leverage affected?</p>	<p>Y:kebijakan utang  Proksi: -DIF PAJAK &amp; PAJAK DIF 3 THN X1: retribusi bank X2: bias utang dalam perpajakan X3: struktur permodalan bank</p>	<p>Negara yang mengenakan pajak penghasilan perusahaan yang sangat tinggi, insentif pungutan bank untuk  mengurangi leverage menjadi <b>tidak signifikan.</b> Oleh karena itu, pungutan bank hanya mampu mengatasi sebagian bias utang dalam perpajakan</p>
---	--	---	--	---

4	Vitriyani Djuli Sjafei Purba, Sri Martina, 2022	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang	Y:kebijakan hutang X1: profitabilitas  X2:ukuran perusahaan  Proksi: ROA	1.variabel likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara bersamaan (simultan) terhadap kebijakan hutang  2.variabel yang paling dominan mempengaruhi kebijakan hutang pada penelitian ini yaitu Likuiditas (X1)
---	---	--	---	---

5	Aga ardiyanto, sunarto 2022	pengaruh Likuiditas, Struktur Aset, Profitabilitas dan <i>Free Cash Flow</i> terhadap Kebijakan Hutang	Y:kebijakan hutang  X1:struktur aset X2:profitabilitas X3: free cash flow  Proksi: -FAR	1. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan hutang  2. struktur aset berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan hutang  3. profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang  4. free cash flow terdapat pengaruh positif signifikan terhadap utang.
---	-----------------------------	--	---	--

6	Ni Made Dhyana Intan Prathiwi , I Putu Yadnya 2020	Pengaruh free cash flow, struktur aset, risiko bisnis dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang	Y:kebijakan hutang  X1:free cash flow X2: struktur aset X3:risiko bisnis X4:profitabilit as  Proksi: -ROE	1. <i>Free Cash Flow</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan.  2. Struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan  3.Risiko Bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan  4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan.
---	--	--	--	--

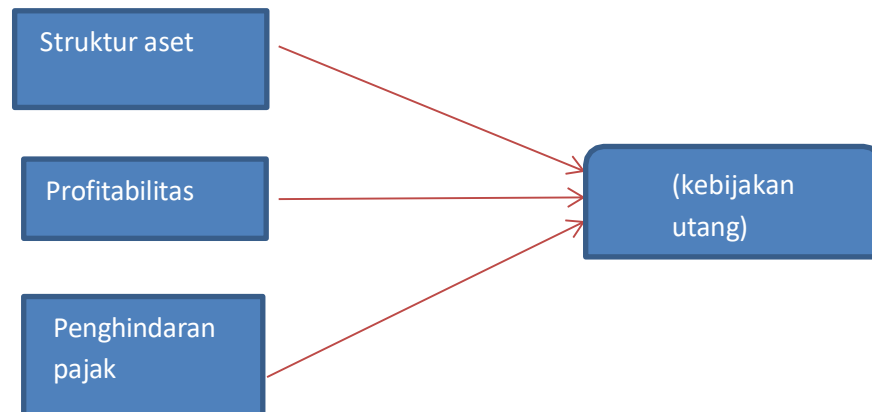
7.	Petrus Gani1, Mipo1, Julfizar, Jhon Raphael Saragih 2023	Pengaruh Struktur Aset, Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang yang terdaftar di Brusa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021	Y:kebijakan hutang  Proksi: DER  X1: struktur aset X2: profitabilitas X3:kebijakan deviden	1. Struktur Aset berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang  2. kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang  3. kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang
----	--	---	--	---

8.	Wila Aulia Putria, A. A Miftahb, Lidya Anggraeni c, 2022	Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021	Y:kebijakan hutang  X1: likuiditas X2:profitabilitas X3:ukuran perusahaan  Proksi: -ROE	1. Variabel likuiditas (X1), Profitabilitas (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kebijakan hutang.  2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kebijakan hutang pada penelitian ini yaitu Likuiditas (X1)
----	--	---	---	--



9.	Elisya carlin, Eny purwaningsi. 2022	Pengaruh Struktur Aset , Profitabilitas, Biaya Agensi dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang	Y: kebijakan hutang X1: struktur aset X2:profitabilitas X3: biaya agensi X4: pertumbuhan perusahaan  Proksi: -ROA	1. struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang  2. profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang  3. biaya agensi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang  4. pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang
----	---	---	---	--

## 2.8 Kerangka Pemikiran



## 2.9 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam pengujian hipotesis keputusan yang diambil dapat berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif terhadap variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut. Berdasarkan dekripsi dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

### 2.9.1 Pengaruh struktur aset terhadap kebijakan utang

Struktur aset adalah penentu berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aset, baik dalam aset lancar maupun dalam aset tetap (Susilawati et.al, 2012) dalam (Prabowo et al, 2019) Berdasarkan penelitian terdahulu terkait struktur aset terhadap kebijakan utang oleh (Ardiyanto dan Sunarto, 2022) yang menyatakan struktur aset berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian oleh (Ganil, et al) dan (Putri, et al 2022) yang menjelaskan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan utang, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

H1: Struktur aset berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang

### 2.9.2 Pengaruh penghindaran pajak terhadap kebijakan utang

Menurut Pohan Chairil Anwar (2014:41) mengatakan bahwa “Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman

bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (not contrary to the law) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitanggung (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang dan Terdapat pula penelitian serupa dilakukan oleh Azizah (2016), Hasil penelitian menunjukkan variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan utang.

H2: Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang

### **2.9.3 Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang**

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang sedikit. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan lebih memilih pendanaan untuk operasional nya menggunakan dana internal perusahaan dengan asumsi bahwa perusahaan akan mengalokasikan sebagian besar keuntungan pada laba ditahan (Narita, 2012) dalam (Prabowo at al, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait profitabilitas terhadap kebijakan utang oleh Namun dari penelitian terdahulu terkait profitabilitas terhadap kebijakan utang oleh (Endri, Bob Mustafa 2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang. Namun hal itu Berbeda dengan pendapat (Wila Aulia, Lidya 2022) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang.

H3: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.